

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang Masalah**

Partisipasi segmen pemilih pemula dalam dunia politik ini banyak menemukan permasalahan dalam realitanya. Dimana pemilih pemula ini terkadang kurang mengetahui terkait dengan informasi mengenai kepemiluan, lima dari sepuluh orang menyebutkan bahwa mereka tidak tahu bagaimana tahapan kepemiluan dan kurang mengetahui bagaimana cara menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, sehingga memunculkan sikap yang apolitis atau generasi yang tidak tertarik dengan politik. Sehingga perlu menjadi perhatian sebab perasaan tidak terwakilkan bisa menimbulkan kekecewaan dan apatis. Tiga dari sepuluh pemilih pemula memiliki pandangan bahwa politik itu sarat akan berbagai kepentingan, menggunakan praktik politik instan. Serta dua dari sepuluh pemilih pemula juga berpendapat bahwa aktor dan elit politik masih didominasi oleh kelompok konservatif dengan kerja politik yang konvensional, tidak memiliki inovasi dalam dunia perpolitikan dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan. Sikap yang apatis dan skeptis terhadap dunia politik yang membuat mereka menjadi bersikap apolitis sebagai bentuk kritik terhadap politik.

Pemilih pemula pada pemilihan umum sebelumnya, sering dituntun untuk memilih kepada pasangan calon tertentu dengan menggunakan jargon tertentu, melalui media social tanpa mendalami alasan mengapa mereka harus memilih paslon tersebut. Banyak pemilih yang belum berpengalaman dalam hal ini juga tidak mengetahui langkah-langkah yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Para pemilih ini sangat rentan terhadap pengaruh orang-orang terdekat mereka, seperti orang tua atau kerabat dekat, karena mereka mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Kurang minatnya atau minimnya kesadaran pemilih pemula dalam hal pemilihan umum serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan juga bertugas guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilihan umum. Sehingga Pendidikan politik untuk segmen pemilih pemula perlu untuk dilakukan agar pemilih pemula ini bisa dengan bijak untuk memilih calon pemimpinnya.

Pemilih pemula ini merupakan orang baru yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu sehingga populasi mereka ini menarik untuk dijadikan penelitian. Mereka

yang memberikan suara pada pemilihan umum pertama mereka adalah demografi baru yang berbeda dari pemilih sebelumnya dalam hal pengalaman, tantangan, sejarah, dan sifat-sifat mereka. Pemilih pemula bisa di bilang sebagai orang yang baru atau akan mengikuti pemilu, yang dimana rentan usia pemilih pemula berumur 17-21 tahun (Wardhani 2018). Sebagian besar kelompok ini biasanya dari kalangan pelajar dan kelompok memiliki pemahaman yang tinggi mengenai teknologi informasi yang semakin maju ini, seperti halnya menggunakan laptop, handphone serta gadget lainnya. Mereka memiliki keahlian dalam penggunaan social media seperti facebook, Instagram, tiktok, twitter, Linked in, dan lainnya.

Generasi muda ini dapat berpikir kritis dan mandiri, serta mudah menerima pembelajaran baru. Namun, mereka menghadapi banyak rintangan yang sulit, seperti perubahan iklim politik, masalah-masalah nasional yang sepertinya tidak ada jawabannya, dan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan globalisasi, perdagangan bebas, keterlibatan asing, terorisme, dan krisis-krisis lainnya. Memahami beragam karakteristik, pengalaman, latar belakang, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemilih pemula ini sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang perspektif mereka. Hal ini sangat penting terutama ketika berkonsentrasi untuk membekali pemilih pemula dengan pemikiran kritis, kecerdasan, dan pola pikir yang berwawasan ke depan. Tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula juga datang dari minimnya pengetahuan mengenai pemilihan umum, bagaimana alur serta cara dalam mengikuti pemilihan umum. Tidak jarang juga pemilih pemula kurang mengetahui mengenai calon-calon legislative atau calon presiden dalam pemilihan umum tentang visi-misi, serta kurang tahunya pemilih pemula akan prospek kedepannya yang dijanjikan oleh orang-orang yang mencalonkan diri.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan keterlibatan perorangan atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu, dimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip transparan, kesukarelaan, kredibel, akuntabel, kepentingan umum, kepastian hukum, profesionalitas, proposionalitas, efisien, anti kekerasan, efektif, dan tidak memihak. Tujuan dari pelibatan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum serta memberikan informasi mengenai pemilihan umum, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum, dan mengedukasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan hak politik masyarakat

dengan baik dan benar (Gleko, Suprojo, and Lestari 2017). Milbart dan Geol dalam (Azzuhri 2022) menyebutkan bahwasannya partisipasi politik pemilih dikategorikan menjadi tiga yaitu *Pertama*, Pemain atau Gladiator yang dimana kategori ini termasuk masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik. *Kedua*, Spectators merupakan masyarakat yang pernah ikut dalam pemilihan umum. *Ketiga*, apatis yang berarti masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam proses politik.

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 pada Tahun 2022 Bab II Pasal 2 menyebutkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Pada Bab III Pasal 10 tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat pada pemilihan umum bisa dilaksanakan dengan Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pendidikan politik untuk pemilih, Sosialisasi Pemilihan umum, mengikuti perhitungan cepat hasil pemilihan umum, Survei atau jajak pendapat, serta pemantauan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilu ini dengan mengikuti seluruh kegiatan yang ada pada tahapan pemilihan umum yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti halnya keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data pemilih, peliputan, pemberitaan, atau publikasi dan penelitian atau kajian.

Isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dapat dijabarkan kembali sebagai berikut: “Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara profesional, terjamin integritas, kompetensi, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab menjamin terwujudnya hak-hak politik rakyat dalam proses pemilu”. Tujuan dari hal ini adalah untuk memungkinkan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya pemilu yang adil, transparan, dan jujur, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan kolektif masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa KPU bertugas melakukan sosialisasi mengenai pemilu gubernur, bupati, dan walikota, termasuk rincian tugas dan wewenangnya di tingkat daerah. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat komisi pemilihan umum mempunyai tugas untuk menyusun kegiatan yang bervariasi guna untuk menarik masyarakat agar mau mengikuti pemilihan umum.

Untuk mendorong adanya tingkat partisipasi masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal yang ada dilingkungan sekitar masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum harus mampu menciptakan strategis untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan hak dan kewajiban penting mereka sebagai warga Negara Indonesia pada saat pemilihan umum, yang dimana diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat ikut andil pada pemilu yang akan datang. Berpatokan dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2022 pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b yang mengatur mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat. Yang dimana pada Bab III pasal 31 menyebutkan bahwa kegiatan partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau Pendidikan pemilih. Yang dimana tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan secara hirarkis oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Pusat.

Tatanan suatu Negara Demokrasi ditandai dengan adanya partisipasi politik sekaligus hal ini menjadi ciri terdapatnya modernisasi politik dalam suatu negara. Kumoroto dalam (Efriza 2012) menjelaskan partisipasi sendiri ialah perilaku suatu golongan ataupun kelompok dan individual yang menunjukkan adanya hubungan yang kebergantungan antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Supriyono dalam (Lestari 2019) partisipasi politik masyarakat sendiri menjadi salah satu hal yang bisa untuk mempengaruhi suatu keputusan politik dalam pemilihan pemimpin. Keikutsertaan masyarakat dalam politik menjadi hal yang penting karena dengan adanya hal itu bisa mempengaruhi model kebijakan yang akan di gunakan oleh pemerintahan yang menjabat dimasa yang akan datang.

Kedaulatan rakyat menjadi suatu penunjuk implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi dalam partisipasi politik negara demokrasi, dimana keikutsertaan masyarakat pada pemilihan umum atau biasa disebut sebagai pesta demokrasi. Semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam dunia politik menunjukkan bahwasannya masyarakat kurang mengapresiasi atau kurang minat dalam masalah atau kegiatan kenegaraan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam politik mengindikasikan pemahaman dan partisipasi yang lebih besar dalam operasi pemerintahan. Sikap Golongan Putih merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat keterlibatan politik dalam pemilihan umum kali ini. (Moad 2018).

Rendah atau tingginya suatu partisipasi politik dalam pemilu menunjukkan jalannya suatu tatanan demokrasi dan implementasi dari kedaulatan rakyat. Pemilu memiliki tujuan dalam pemilihan wakil rakyat atau pemimpin yang memiliki kemampuan, aspiratif, dan berdedikasi tinggi demi kemajuan masyarakat. Tidak hanya itu pemilu sendiri juga menjadi suatu wadah yang berguna untuk mewujudkan demokrasi serta untuk meraih kedaulatan rakyat.

Data pemilih pemula berdasarkan jenis umur di Kota Batu terdapat sebanyak 13.076 jiwa, dan secara umum berdasarkan pada data laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu pada bulan September mencapai 156.698 orang, meningkat dari data di bulan agustus dengan 149.682 orang. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 77.945 jiwa dan perempuan berjumlah 78.753 jiwa, mulai bulan Juli, Agustus sampai September. Jika dilihat dengan data terbaru dan daftar pemilih lanjutan pada rekapan bulan agustus 2022 terlihat adanya peningkatan sebesar 7.016. Adanya tambahan jumlah pemilih ini berdasarkan hasil data koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan jika ditemukan penurunan bisa saja berasal dari beberapa factor yaitu, ditemukannya data orang yang sudah meninggal, pindah status, ganda kota atau kabupaten, dan pemilih pemula. Pada Pemilihan Umum 2024, Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Batu memprediksi akan ada kenaikan Daftar Pemilih tetap pemula sebanyak 10 persen dari total DPT yang ada sekarang. Dimana hal itu menandakan terdapatnya penambahan pemilih. Namun, prediksi tersebut bukan pertambahan final, sebab KPU Kota Batu akan mendapatkan data pasti dari KPU Pusat yang nantinya akan disinkronkan dengan keadaan di lapangan.

Pada pemilihan umum tahun 2019 sebanyak 20.429 jiwa dan tahun 2024 sebanyak 15.287 jiwa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Jika dilihat dari data tersebut menunjukkan banyak masyarakat di tahun 2019 memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini bisa saja terjadi karena banyak masyarakat yang kurang minat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Minimnya Pendidikan politik yang dilakukan dimasyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui kewajiban masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum ini juga menjadi salah satu factor tingginya ke tidak ikut sertaan masyarakat dalam dunia politik. Dan jika dilihat pada tahun 2024 terdapat penurunan angka masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini menunjukkan bahwa

setidaknya ada penurunan tingkat ke tidak ikut sertaan masyarakat dalam pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilu ini sangat mengutamakan partisipasi masyarakat dalam politik, sebab masyarakat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang di inginkan. Oleh karena itu, KPU menciptakan sejumlah taktik untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu (Lestari, Azikin, and Rahim 2020a). Strategi ini menjadi pondasi tujuan organisasi serta bentuk pendekatan manajemen pencapaian tujuan (Anwar 1984). Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik sendiri bisa melalui beberapa hal. Salah satu halnya bisa melalui sosialisasi pemilu tentang pendidikan politik dimana suatu hal yang khusus untuk dilakukan sebab sebagai pemenuhan kebutuhan pemahaman dasar untuk pemilih pemula pada proses pembentukan serta pengembangan pengetahuan kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan ini menjadi suatu hal yang penting sebab pemilih pemula bisa untuk mempertimbangkan kualitas calon yang nantinya akan mereka pilih.

Sosialisasi dan Pendidikan pemilih menjadi salah satu hal dalam perealisasiian pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan sehingga hal ini diharapkan bisa mengajak pemilih pemula untuk memilih dan juga bisa untuk menyadarkan secara kritis terkait dengan tahapan pemilihan umum. Oleh karena itu, populasi pemilih pemula tidak dimanfaatkan lagi sebagai suatu objek dalam pemilihan umum, namun dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan membuat keputusan dan mendukung para kandidat agar dapat memperjuangkan hak-hak rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga dapat menjunjung tinggi sistem demokrasi di Indonesia.

Lembaga Negara yang menaungi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ialah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sebagai Lembaga yang menaungi pemilu memiliki kewajiban dan dituntut untuk bersikap professional, memiliki integritas, akuntabilitas serta kapabilitas. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu sehingga nantinya bisa menjamin terlaksananya hak politik masyarakat dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat sering dimaknai sebagai salah satu indicator dalam keberhasilan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa legitimasinya tidak perlu diragukan lagi. Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu merupakan garis terdepan suatu negara yang melaksanakan pemilihan umum. Yang dimana penyelenggara pemilu ini

berurusan dengan peserta partai politik secara langsung, namun tidak hanya itu saja penyelenggara pemilu juga berhadapan langsung dengan masyarakat dan juga bertanggung jawab penuh terhadap pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja untuk menjunjung tinggi dan melayani kepentingan semua pihak, termasuk partai politik, masyarakat, dan pemerintah, tanpa pernah mengambil sikap partisan. Selain itu, KPU secara konsisten melaksanakan semua tahapan pemilu selaras dengan aturan atau hukum yang ada, dan selalu mempertimbangkan keterbatasan pihak yang ikut serta dalam tahapan-tahapan pemilihan umum. KPU memiliki peranan untuk memaksimalkan serta menanamkan kesadaran pada Pemilih agar mereka bisa ikut andil dalam pemilihan umum serta untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Proses pemilihan umum menerapkan prinsip Umum, Langsung, Rahasia, Bebas, Adil dan Jujur sebagai sarana integrasi bangsa.

Penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya Pendidikan politik harus diperhatikan lagi sebab di kalangan pemilih pemula Pendidikan politik masih tergolong rendah. Pemilih pemula rentan untuk dipilih untuk kepentingan tertentu karena rendahnya tingkat pendidikan politik mereka. Dalam kasus ini kelompok pemilih pemula sedang ada di fase perlihan dari remaja menuju fase dewasa. Pemilih pemula pada fase dewasa ini memiliki perspektif yang luas, dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan aktif mencari solusi atas pertanyaan mereka. Mereka memanfaatkan social media sebagai sarana untuk mencari jawaban. Namun hal ini membuat khawatir karena bisa saja mereka mendapatkan sedikit informasi bahkan bisa saja mendapatkan info hoax yang ada di media social. Jika terdapat kejadian seperti ini bisa berpengaruh buruk atau kabar yang mereka dapatkan itu hanyalah hoax yang banyak tersebar di media social yang membuat mereka gampang percaya atau bisa saja sebagai aktor penyebar hoax tersebut.

Penelitian ini penting untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yang dimana biasanya mereka kurang aktif dalam proses politik. Partisipasi politik yang aktif ini bisa meningkatkan keamanan dan stabilitas serta bisa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik di Kota Batu. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi diharapkan bisa untuk mengurangi konflik yang mungkin saja bisa terjadi dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perlu perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu bisa untuk menyadarkan pemilih pemula akan pentingnya

berpartisipasi dalam pemilu agar sisi anti politik pemilih pemula bisa berubah menjadi warga negara yang sangat melek dengan politik. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu tahun 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengingat konteks permasalahan di atas, maka peneliti mengartikulasikan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024?
2. Apa Saja Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, khususnya terkait strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula pada Pemilu 2024, mengingat banyak pemilih muda yang akan berpartisipasi dalam pemilu pertama mereka, khususnya di Kota Batu, serta diharapkan bisa untuk dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa penulisan penelitian ini akan memberikan manfaat praktis dalam bentuk referensi bagi pemerintah atau pemangku kepentingan di Kota Batu untuk memperhatikan strategi dalam meningkatkan partisipasi politik dan mengurangi angka golput dalam pemilihan umum tahun 2024.

## **1.5 Definisi Konseptual**

### **1.5.1 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik ialah analisis politik modern yang menjadi masalah



penting yang cukup krusial dan berhubungan dengan negara-negara berkembang. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem politik demokratis juga termasuk dalam definisi ini karena pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan bersama rakyat adalah dasar pemikirannya. Mulanya, konsep ini berfokus kepada partai politik yang menjadi pelaku utama. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi telah berubah dengan munculnya rukun warga yang ingin terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Milbart dan Goel dalam (Subekti 2014) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua, spectator* yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga, gladiator* yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Budiarjo (Budiardjo 2007) menyebutkan bahwasannya keterlibatan masyarakat dalam dunia politik sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok maupun individu masyarakat dalam bidang politik yang melibatkan keikutsertaan mereka secara langsung dalam memilih pemimpin bangsa melalui pemilihan langsung atau tidak langsung, dan berdampak pada regulasi yang akan diambil pemerintah. Aktivitas politik seperti ini memberikan suara dalam pemilihan umum sebagaimana diizinkan oleh hukum, mengikuti Gerakan sosial atau menjadi salah satu anggota partai tertentu dan sebagainya.

Partisipasi politik adalah istilah lain untuk semua jenis kegiatan publik yang dilakukan secara pribadi atau disengaja yang berusaha mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik dapat dilaksanakan secara terorganisir atau spontan, sporadis atau mantap, dengan kekerasan atau damai, melanggar hukum atau sah, tidak efektif atau berhasil, dan bersifat individual atau kolektif. Gagasan keterlibatan politik dalam demokrasi berlawanan dengan gagasan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan melalui upaya kolaboratif untuk memastikan tujuan jangka panjang bangsa dan identitas pemegang kekuasaan di masa depan atau mereka yang dapat disebut sebagai pemimpin. Partisipasi politik ialah suatu bentuk pelaksanaan dari adanya kekuasaan politik yang secara sah ada dalam masyarakat.

Masyarakat yang ikut andil dalam proses politik seperti pemberian suara

atau kegiatan lainnya, mereka meyakini bahwasannya dengan mengikuti kegiatan politik maka mereka akan lebih diperhatikan dan mereka memiliki peran dalam mempengaruhi suatu tindakan yang akan di ambil oleh pihak yang berwenang untuk membuat keputusan. mereka meyakini bahwasannya kegiatan yang mereka lakukan memiliki efek yang positif dalam dunia politik. Dari sini bisa dilihat bahwasannya keikut sertaan masyarakat dalam politik berhubungan erat dengan kesadaran politik masyarakat, sehingga mereka menuntut untuk diberikan hak dalam menyuarakan aspirasinya pada penyelenggaraan pemerintah.

Negara yang menganut system Demokrasi ini menganggap bahwa banyaknya partisipasi masyarakat dalam dunia politik itu menunjukkan bahwasannya masyarakat memahami serta mengikuti masalah yang ada di dunia politik dan keinginan ikut serta dalam kegiatan berpolitik. Hal ini juga menunjukkan jika pihak elit atau rezim yang berkaitan mempunyailegitimasi atau pengakuan masyarakat yang tinggi.

#### 1.5.2 Strategi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ialah salah satu aspek penting pelaksanaan pemilu, sehingga KPU memerlukan strategi khusus agar bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Salah satu langkah yang digunakan orang, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan dan menentukan sasaran dan tujuan dalam jangka waktu yang panjang adalah strategi. Hal ini mencakup penggunaan serangkaian aktivitas dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk jangka waktu yang lama, serta mewujudkan semua rangkaian aktivitas dan mengelola sumber daya lokal guna mencapai tujuan yang di inginkan (Salusu 1996). Lebih lanjut menurut Rosady Ruslan dalam (Haryono 2018) menyebutkan bahwa strategi ialah suatu susunan rencana serta manajemen guna mencapai sebuah tujuan yang telah ditetntukan dalam realisasi operasionalnya. Strategi ialah langkah perencanaan serta tindakan yang telah di rangkai dan di siapkan dalam kerangka kegiatan atau program yang telah di buat guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan kekuatan serta kelemahan yang dipunyai.

#### 1.5.3 Pemilih Pemula

Pada dasarnya pemilih merupakan individua tau perseorangan yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya atau hak pilihnya pada proses

pemilihan kepala negara ataupun pemilihan legislative. Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilih pemula adalah masyarakat Indonesia yang terdaftar pada daftar pemilih, belum pernah ikut pemilu sebelumnya, atau baru mengikuti pemilihan umum sejak pemilihan umum berlangsung di Indonesia. Biasanya mahasiswa, pelajar, atau pemilih berusia 17-21 tahun merupakan populasi pemilih pemula.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV, Pasal 19 ayat 1 dan 2, dan Pasal 12 tentang Pemilih Pemula, mereka adalah masyarakat Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, memiliki hak untuk memilih, dan tidak termasuk ke daftar pemilih tetap di pemilu sebelumnya karena adanya undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu. Menurut (Batawi 2013) remaja yang secara khusus merupakan pemilih pemula memiliki nilai kebudayaan ataupun sikap yang bebas, santai, dan mengutamakan yang informal, serta mengejar kepentingan mereka sendiri, sehingga ada banyak hal yang dihindari jika dirasa kurang menyenangkan.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional peneliti untuk partisipasi politik pemilih pemula Kota Batu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada pemilu 2024.
  1. Strategi Penguatan Kelembagaan
  2. Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula
  3. Capaian Partisipasi Politik
- b. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2024
  1. Faktor Eksternal
  2. Faktor Internal

### **1.7 Metode Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan strategi dan mengevaluasi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk mendorong pemilih pemula berpartisipasi dalam politik pada pemilu 2024. Metode merupakan suatu tahapan secara praktis untuk dijalankan oleh peneliti untuk mendapatkan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, jenis penelitian,

sumber data, subjek, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data akan dibahas sebagai berikut :

#### 1.7.1 Jenis penelitian

Untuk memecahkan suatu masalah yang akan di teliti dan dicermati berdasarkan pada realita yang ada, maka studi ini akan menerapkan metode deskriptif pada penelitian kualitatif, seperti yang dilakukan penelitian ini akan merumuskan masalah yang akan menuntun peneliti untuk dapat mengeksplorasi atau merekam kondisi sosial yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh nantinya. Selain itu juga akan menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi. Metode ini didasarkan pada filosofi postpositivisme, dimana dalam praktiknya penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan ini dengan mengamati kondisi objek yang alami dan peneliti sebagai instrument utama. Peneliti ingin menjelaskan dan menjabarkan keadaan yang telah di amati di lapangan secara lebih detail, mendalam dan transparan. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif kemudian diterapkan dalam investigasi ini. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih detail, transparan, dan tepat mengenai kondisi lapangan yang akan diamati.

Penelitian ini juga berkaitan dengan data, data yang dimaksud ialah data yang berhubungan dengan pandangan responden dalam bentuk cerita terperinci atau cerita asli sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Setelahnya, data yang ada akan menghasilkan suatu pemahaman dan menghasilkan suatu penemuan baru yang dijadikan sebagai informasi serta gambaran terkait strategi batuu rencana yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk meningkatkan keterlibatan politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2024. Data yang di dapatkan bisa dikumpulkan melalui survey, wawancara, atau observasi.

#### 1.7.2 Sumber Data

Para peneliti memisahkan sumber data ini ke dalam dua kategori: informasi primer dan sekunder. Informasi data primer mengacu pada informasi yang unggul secara langsung dikumpulkan dan diperoleh dari subjek penelitian untuk memenuhi tujuan penelitian. Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi pendukung yang berasal dari studi sebelumnya atau informasi yang

disebarkan oleh organisasi lain atau media. Data yang ada nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan penelitian (Hidayat 2019).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Sumber data yang di dapatkan langsung dari narasumber yang terpercaya sehingga bisa dipastikan bahwa data tersebut sangat terpercaya dan informasi yang didapatkan bersangkutan dengan judul penelitian. Untuk penelitian ini, data primer bersumber dari actor atau petinggi yang berperan langsung, yaitu Ibu Marlina. SP., M.Si. selaku Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dan Bapak Ariansyah Mustofa, S.IP. selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Batu.

b. Data Sekunder

Informasi yang digunakan untuk mendukung data primer disebut sebagai data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapat selain dari data wawancara, dokumentasi atau observasi. Data pada penelitian ini diperoleh dari website KPU Kota Batu <https://kota-batu.kpu.go.id/>, data yang di ambil ialah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Batu serta data tingkat partisipasi masyarakat di Kota Batu. Data penunjang lainnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono dalam jurnal (Tanujaya 2017) menyebutkan bahwasannya Subjek penelitian adalah orang, benda, atau kegiatan yang variabel-variabel spesifiknya telah dipilih untuk dipelajari dan dianalisis. Informan adalah orang yang memiliki informasi dan memberikan data kepada peneliti tentang penelitian yang sedang peneliti lakukan. Mereka adalah subjek dari penelitian kualitatif. Informasi yang didapatkan sendiri bisa berupa kondisi latar belakang masalah dan situasi yang ada pada penelitian. Subjek penelitian disini ialah pihak yang dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga subjek ini memberikan informasi atau data terkait dengan penelitian yang di lakukan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berhati-hati dalam menentukan informan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat dan komprehensif. Para peneliti mengidentifikasi informan penelitian yang dianggap memiliki banyak informasi dan pengalaman, terutama yang berkaitan dengan pendekatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula.:

- a. Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Batu.

#### 1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi di mana studi akan dilakukan disebut sebagai lokasi penelitian. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 16 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan subjek penelitian atau sampel untuk mendapatkan data penelitian dari sumber data. Metode pengumpulan data ini sangat penting bagi peneliti karena berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan peralatan penelitian. Instrument penelitian sendiri ialah suatu kesatuan alat yang nantinya digunakan peneliti guna untuk mengumpulkan data penelitian. Ini adalah fase penting dalam proses pengumpulan data karena di sinilah metode pengumpulan data yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan data yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan di masa depan. Sehingga dalam tahapan pengumpulan data ini tidak boleh ada kesalahan dan diwajibkan dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan ketentuan dan ciri dari penelitian kualitatif sendiri. Jika terdapat salah atau ketidaksempurnaan pada metode ini maka nantinya bisa bersifat fata, yaitu bisa menyebabkan data tidak terpercayaa dan membuat peneliti tidak mampu atau tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif sering kali mencakup wawancara, dokumentasi, dan observasi.

- a. Observasi

Salah satu pendekatan untuk mengumpulkan informasi dan data untuk

melengkapi penelitian ini adalah melalui observasi langsung di lapangan yang menjadi lokasi penelitian. Teknik observasi ini dimulai dengan melakukan pengamatan serta mencatat yang bersifat logis, sistematis, rasional dan objektif terhadap berbagai macam fenomena yang ada dalam situasi buatan maupun nyata. Secara sempit observasi diartikan sebagai penelitian dengan mencatat sistematis dan mengamati gejala yang sedang diselidiki. Secara luas, observasi merupakan pengamatan atau pengawasan dimana dalam setiap kegiatan yang ada selalu melakukan pengukuran. Untuk mengimplementasikan hasil observasi dan memastikan strategi KPU Kota Batu dalam mendorong tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2024 berjalan semaksimal mungkin, peneliti yang melakukan penelitian ini akan melakukan kegiatan Magang Penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu.

b. Wawancara

Peneliti yang melakukan penelitian ini akan melakukan magang penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk mempraktikkan temuan-temuan dari hasil observasi dan memastikan bahwa strategi KPU Kota Batu dalam mendorong tingkat partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2024 berjalan semaksimal mungkin. Peneliti akan melakukan percakapan tanya jawab secara tatap muka dengan responden melalui Teknik *purposive* agar peneliti bisa melakukan penelusuran pertanyaan dan jawaban diluar list pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga nantinya akan mendapatkan data yang jelas dan komprehensif (menyeluruh atau lengkap).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui Teknik dokumentasi ialah salah satu pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian ataupun peristiwa yang terjadi pada manusia, benda mati atau gejala lainnya (Sugiyono 2018). Pada teknik ini dengan cara melihat serta mengabadikan foto yang dimana nantinya foto tersebut dapat dicantumkan dalam lampiran, dan melakukan Analisa terhadap dokumen serta arsip yang ada tentang rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong tingkat keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilu 2024.

#### 1.7.6 Teknik Analisis Data

Para peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam investigasi ini untuk mengkaji data, yaitu menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Peneliti mengumpulkan data sedikit demi sedikit atau mengumpulkan informasi, mengelompokkan, mereduksi, dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. (Miles and Huberman 1992) dalam bukunya menjelaskan bahwa Tiga pendekatan digunakan dalam analisis data penelitian model interaktif ini, yaitu :

##### a. Reduksi Data

Memusatkan, memilih, mengabstraksi, merampingkan, dan mengubah data "kasar" yang dituliskan atau dikumpulkan selama studi lapangan dikenal sebagai reduksi data. Penelitian lapangan digunakan untuk melanjutkan proses reduksi data ini sampai laporan terakhir selesai.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data ini merupakan bermacam-macam informasi yang disajikan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data ini bisa digunakan untuk acuan dalam melakukan sesuatu dan juga sebagai wadah untuk memahami apa yang terjadi. Hasilnya, lebih mudah bagi peneliti untuk mendeskripsikan semua atau bagian tertentu dari data yang telah mereka kumpulkan untuk menarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk membuat tampilan dalam penelitian ini adalah pembuatan teks naratif. Cara penyajian data adalah melalui serangkaian frasa dan grafik. Agar peneliti dapat menarik kesimpulan, materi disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digabungkan untuk menghasilkan keseluruhan.

##### c. Menarik kesimpulan/ Verifikasi

Membuat kesimpulan dan mengonfirmasikannya merupakan komponen penting dari keseluruhan pengaturan saat melakukan penelitian. Proses verifikasi data memerlukan pemikiran ulang analisis selama pencatatan, tinjauan lapangan, dan interaksi dengan rekan sejawat untuk menciptakan "peluang intersubjektif". Dengan kata lain, hal ini menyiratkan bahwa interpretasi yang diambil dari data perlu diperiksa keakuratan, konsistensi, dan kesesuaiannya (validitas).. Proses penarikan



kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan penyusunan data secara sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Jika tidak ada bukti yang cukup, kesimpulan yang dicapai selama tahap pengumpulan data awal ini dapat diubah. Namun, jika temuan awal didukung oleh data yang dapat dipercaya dan konsisten, temuan tersebut dapat dianggap serius ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data. Tahap ini melibatkan penyusunan kesimpulan dari data yang telah disajikan dan dirangkum secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

